

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde baru menggantikan orde lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde baru berlangsung dari tahun 1965 – 1998. Dalam pemerintahan orde baru, pembangunan di Indonesia sangat berkembang dan mengalami kemajuan di bidang perekonomian.

Kuatnya dominasi negara dan birokrasi dalam mengontrol kehidupan masyarakat membuat pembangunan politik pada masa orde baru tidak berjalan dengan baik. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif, anggotanya bahkan sering kali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang di dengar oleh pusat.”Tekad orde baru adalah melaksanakan Pancasila/UUD 1945 secara murni dan konsekuen tetap dilaksanakan”. (Sulastomo, 2008: 191)

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa orde baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui

peran serta yang didominasi militer. Begitu kuatnya kekuasaan politik Soeharto yang ditopang oleh birokrasi dan militer, membuat struktur politik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini telah menghambat fungsi-fungsi struktur politik demokrasi pada masa pemerintahan Soeharto.

Pada tahun 1965 terjadi pergolakan politik di Indonesia, yaitu pergantian orde lama ke orde baru. Bersamaan dengan perubahan politik itu, rezim orde baru melarang segala sesuatu yang berbau Tionghoa. Segala kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa tidak boleh dilakukan lagi. Hal ini dituangkan dalam instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967. Dengan alasan, masyarakat keturunan Tionghoa dicurigai masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya dan rasa nasionalisme mereka terhadap negara Indonesia diragukan. Akibatnya, keluarlah kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat keturunan Tionghoa baik dalam bidang politik maupun sosial budaya.

Sebagian masyarakat ada juga yang beranggapan orang Tionghoa juga mempunyai rasa nasionalisme dan tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok/golongannya. Tidak semua orang Tionghoa berperilaku seperti yang biasa dilakukan oleh kelompoknya.

Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak mereka. Etnis Tionghoa sering dianggap bukan orang Indonesia, dianggap sebagai warga kelas II bahkan dibenci. Padahal etnis Tionghoa ini sudah banyak yang menjadi warga negara Indonesia. Dampak dari kebijakan orde baru ini, masyarakat Tionghoa Indonesia tidak dapat menikmati kebudayaan mereka sendiri, seperti kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari

raya imlek dan pemakaian bahasa mandarin dilarang. (Adnan Buyung Nasution, 2006: 128)

Kebencian terhadap etnis Tionghoa ini tidak hanya pada masa orde baru saja, pada masa orde lama, pengejaran terhadap orang-orang Tionghoa (etnis Tionghoa) merupakan bagian dari pelaksanaan serta pengembangan politik anti Tionghoa. Konsep pemikiran pemerintah mengenai kepemilikan perusahaan untuk pribumi telah meminggirkan usaha milik etnis Tionghoa. Sebutan Tionghoa untuk etnis Tionghoa telah mampu melemahkan atau membuat perbedaan terhadap keberadaan kaum pribumi dan etnis Tionghoa sebagai kaum pendatang yang harus tunduk kepada masyarakat pribumi.

Pada masa orde baru, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa masih saja berlanjut. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan terhadap etnis Tionghoa sangat mendiskriminasi. Secara otomatis hal ini mengambil hak asasi etnis Tionghoa sebagai warga negara Indonesia dan sebagai manusia.

Fenomena diskriminasi rasial yaitu memperlakukan etnis Tionghoa secara tidak adil karena ras mereka, nampaknya sudah diatur sedemikian rupa. Tak hanya masyarakat di kalangan pejabat pemerintah saja yang begitu sentimen dengan orang-orang non pribumi yang dianggap tidak setia pada negara, namun masyarakat luas juga ikuti menjadi tidak menyukai etnis ini". (Leo Suryadinata, 2008: 48)

Padahal, hal ini sangat bertolak belakang dengan bangsa Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan Indonesiapun telah menyatakan diri sebagai negara demokrasi yang seharusnya mengakui dan menjaga hak asasi manusia. Namun, diskriminasi yang terjadi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia pada masa orde baru ini mau tidak mau memunculkan pertanyaan tersendiri, kenapa pemerintah seolah-

olah membiarkan dan bahkan mendukung adanya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa di Indonesia jelas merupakan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia. Padahal salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Karena, ”walaupun mereka orang keturunan tapi etnis Tionghoa telah berasimilasi dan merasa diri sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan yang sama dan dilindungi seperti warga pribumi lainnya”. (Bindar Gultom, 2009: 93)

Berdasarkan hal inilah, penulis mempunyai keinginan untuk mengkaji lebih jauh tentang politik pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa di masa pemerintahan Soeharto. Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas sehubungan dengan judul di atas, penulis menemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kehidupan etnis Tionghoa pada masa orde baru ?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa pada masa orde baru ?
3. Bagaimana politik pemerintah terhadap etnis Tionghoa pada masa orde baru ?

## **1.2 Alasan Pemilihan Judul**

Adapun alasan mengapa penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Karena penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang kehidupan etnis tionghoa pada masa orde baru.

2. Karena penulis ingin membahas tentang penyebab terjadinya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa pada masa orde baru.
3. Karena penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi tentang politik pemerintah terhadap etnis tionghoa pada masa orde baru.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kehidupan etnis tionghoa pada masa orde baru.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa pada masa orde baru.
3. Untuk mengetahui penerapan politik pemerintah terhadap etnis tionghoa pada masa orde baru.

### **1.4 Anggapan Dasar**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Anggapan dasar adalah merupakan titik tolak untuk menyusun rencana penelitian sebagai tolak ukur memulai perencanaan yang dapat menjadi arah dan batas penelitian. Adapun yang menjadi anggapan dasar oleh penulis adalah :

1. Kehidupan etnis tionghoa pada masa orde baru mengalami diskriminasi dibandingkan dengan penduduk pribumi. Etnis Tionghoa sering dipersulit dalam segala urusan tentang kehidupannya.
2. Penyebab terjadinya diskriminasi terhadap etnis Cina pada masa orde baru adalah kekhawatiran akan penyebaran paham komunisme di tanah air. Oleh karena itu, etnis Cina pada masa orde baru dilarang melakukan politik praktis di Indonesia.

3. Dalam hal mengeluarkan pendapat, etnis Tionghoa sering tidak mendapat kesempatan dalam menyalurkan aspirasinya terutama dalam bidang politik pemerintahan.

### **1.5 Hipotesa**

Hipotesa merupakan perumusan jawaban atau dugaan sementara atas perumusan masalah yang sebenarnya harus dibuktikan melalui suatu kegiatan penelitian. Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah :

1. Kehidupan etnis Tionghoa selalu mengalami diskriminasi pada masa orde baru.
2. Terjadinya diskriminasi terhadap etnis Cina menyebabkan adanya kesenjangan antar warga pribumi dan non pribumi.
3. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa berpengaruh pada kebebasan dalam hidup bermasyarakat.

### **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertumpu pada telaah pustaka, baik berupa buku-buku, ensiklopedi, jurnal, maupun internet. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dan metode yang digunakan adalah metode sejarah kritis dengan menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. "Metode sejarah ini bertumpu pada empat langkah kegiatan yaitu pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan (historiografi)" (Dudung Abdurrahman, 2007: 54)

Dalam rangka mengumpulkan sumber, penulis melaksanakan penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang penulis lakukan di perpustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data-data melalui bahan bacaan yang mempunyai

kaitan atau hubungan dengan permasalahan yang penulis ajukan dalam skripsi ini, sejauh kemampuan yang ada pada penulis.

Langkah-langkah dalam penelitian sejarah meliputi empat tingkat sebagai berikut :

1. Heuristik (mencari sumber-sumber sejarah);

adalah upaya penelitian yang mendalam untuk mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian bersejarah di masa lampau. Dari informasi masyarakat tentang penemuan benda-benda bersejarah, para sejarawan bisa memperoleh berbagai informasi yang akurat dan bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Informasi dari masa lampau tersebut disebut sumber-sumber sejarah.

2. Verifikasi (menilai sumber-sumber sejarah secara kritis);

Yaitu menilai dan meneliti sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan menyangkut dua aspek, yaitu aspek ekstern dan aspek intern. Dalam lingkup kritik ekstrem akan diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

a. Apakah sumber itu memang sumber yang dikehendaki ?

b. Apakah sumber yang diperoleh itu termasuk sumber primer atau sumber sekunder ?

3. Interpretasi (menafsirkan keterangan sumber sejarah);

Adalah menafsirkan dan menyimpulkan keterangan yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang autentik (sumber-sumber sejarah) atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh jejak-jejak masa lampau. Kita berusaha membayangkan bagaimana peristiwa masa lampau itu terjadi.

Proses penafsiran fakta-fakta sejarah serta proses penyusunannya dapat kita masukkan, kita harus memilih mana yang relevan dan mana yang tidak. Pemilihan itu bergantung pada anggapan-anggapan kita dan hal ini ada hubungannya dengan subjektivitas sejarah.

#### 4. Historiografi (penulisan sejarah);

Setelah mencari sumber-sumber sejarah, menilai sumber-sumber itu, dan menafsirkan informasi yang terkandung didalamnya, maka langkah selanjutnya adalah menuliskan hasil penafsiran (intepretasi) atas fakta-fakta sejarah itu menjadi suatu kisah yang selaras.

Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan ini suatu cara yang utama untuk memahami sejarah. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu tulisan yang utuh yang disebut historiografi (Helius Sjamsudin, 2007: 156).

### **1.7 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam penulisan karya ilmiah sejarah, seringkali dibatasi oleh ruang lingkup penulisan, hal ini dimaksud agar tulisan yang dihasilkan tidak melebar dari tema yang ditentukan. Dalam hal ini menyangkut dengan ruang lingkup atau skope temporal dan skope tematikal. Skope temporal yaitu yang berhubungan dengan kurun waktu atau kapan peristiwa itu terjadi. Skope tematikal merupakan pembatasan agar dalam penulisan tidak keluar dari tema yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun skope temporal penulisan proposal ini adalah pada tahun 1965 yang merupakan awal terbentuknya orde baru sedangkan tahun 1998 adalah akhir dari pemerintahan orde baru. Sedangkan skope tematikal dari penulisan proposal ini



meliputi politik pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Soeharto.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Guna menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penyusunan penelitian ini penulis merasa perlu untuk menyusun suatu sistematika pembahasan, sehingga penulisan skripsi ini yang akan dituangkan ke dalam lima bab menjadi jelas. Adapun susunannya dalam bab adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, anggapan dasar dan hipotesa, metode penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.
- Bab II Membahas tentang kehidupan etnis tionghoa pada masa orde baru meliputi : perkembangan etnis tionghoa pada masa orde baru, penataan kehidupan politik orde baru.
- Bab III Membahas tentang Penyebab Terjadinya Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa Pada Masa Orde Baru meliputi: latar belakang diskriminasi terhadap etnis tionghoa era Soeharto dan politik asimilasi Soeharto atas etnis tionghoa.
- Bab IV Membahas tentang Politik Pemerintah Terhadap Etnis Tionghoa Pada Masa Orde Baru yang meliputi: politik identitas, aspirasi politik etnis Tionghoa dan etnis tionghoa dalam dilema politik di Indonesia.
- Bab V Merupakan bab penutup dimana di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.